

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET KONI DIY DALAM PEMANFAATAN  
LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENANGANAN MEDIS  
AKIBAT CEDERA PADA MASA PEMBINAAN PRESTASI ATLET**

Oleh

**Diana Khairunnisa<sup>1</sup> dan Sa'ida Rusdiana<sup>2</sup>**

**INTISARI**

Penulisan hukum ini bertujuan mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap atlet KONI DIY dalam pemanfaatan layanan BPJS Ketenagakerjaan terhadap penanganan medis akibat cedera pada masa pembinaan prestasi atlet, juga tanggung jawab KONI DIY dalam hal terjadi kerugian yang dialami atlet dalam pemanfaatan layanan BPJS Ketenagakerjaan terhadap penanganan medis akibat cedera pada masa pembinaan prestasi atlet.

Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh data sekunder, sedangkan penelitian empiris dilakukan melalui wawancara dengan responden untuk memperoleh data primer. Seluruh data dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, kemudian disusun secara sistematis agar substansi penelitian dapat dipahami secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi atlet KONI DIY meliputi perlindungan hukum internal dan eksternal. Pelindungan hukum internal bersumber dari hubungan kerja antara KONI DIY dan atlet selama masa pembinaan yang didasarkan pada perjanjian kerja secara lisan, sedangkan perlindungan hukum eksternal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak terlaksana penuh akibat penghentian iuran BPJS Ketenagakerjaan ketika atlet masih memerlukan pelayanan medis lanjutan atas cedera yang dialami selama masa pembinaan. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara karena bertentangan dengan Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 31 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019.

**Kata Kunci: Pelindungan Hukum, BPJS Ketenagakerjaan, Cedera Atlet**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata-1 (S-1) Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

***LEGAL PROTECTION FOR KONI DIY ATHLETES IN THE UTILIZATION OF BPJS  
EMPLOYMENT SERVICES FOR MEDICAL TREATMENT OF INJURIES DURING THE  
ATHLETE TRAINING PERIOD***

*By*

**Diana Khairunnisa<sup>1</sup> and Sa'ida Rusdiana<sup>2</sup>**

***ABSTRACT***

*This legal research aims to identify and analyze the legal protection provided to KONI DIY athletes in utilizing BPJS Employment services for medical treatment of injuries sustained during the athlete training period, as well as the responsibility of KONI DIY in cases where athletes suffer losses in accessing BPJS Employment services for injury treatment during the training period.*

*This research employs a juridical-empirical method with a descriptive-analytical approach. The juridical component is carried out through literature research on primary, secondary, and tertiary legal materials to obtain secondary data, while the empirical component is conducted through interviews with respondents to obtain primary data. All data are analyzed using qualitative methods and presented descriptively, then systematically arranged to enable a comprehensive understanding of the research substance.*

*The results of the research indicate that legal protection for athletes under KONI DIY consists of internal and external legal protection. Internal legal protection arises from the employment relationship between KONI DIY and the athletes during the training period, which is based on an oral employment agreement, while external legal protection has been regulated under statutory provisions but has not been fully implemented due to the termination of contributions to BPJS Employment at a time when the athletes still required continued medical treatment for injuries sustained during the training period. Therefore, such conduct may be classified as an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, as it contravenes Article 86 of the Manpower Law, Article 31 of the National Social Security System Law, and Article 25 of Government Regulation Number 82 of 2019.*

***Keywords: Legal Protection, BPJS Employment, Athlete Injuries***

---

<sup>1</sup> Student of Departement of Private Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Lecturer of Departement of Private Law Faculty of Law Universitas Gadjah Mada